



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DEDEN APRIANDHI HARTAWAN**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DPRD**
3. NHK : **79580**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. **3.018.690.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 551 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, WARISAN Rp. 1.746.240.000
2. Tanah Seluas 560 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 217.260.000
3. Tanah Seluas 208 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 126.480.000
4. Tanah Seluas 144 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 146.880.000
5. Tanah Seluas 522 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 84.150.000
6. Tanah Seluas 588 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, WARISAN Rp. 624.240.000
7. Tanah Seluas 67 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, WARISAN Rp. 73.440.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. **3.423.800.000**

1. MOBIL, JEEP RUBICON Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 1.710.000.000
2. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 1.713.800.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. **31.237.500**

D. SURAT BERHARGA

Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. **180.725.000**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	2.500.000.000
Sub Total	Rp.	9.154.452.500
III. HUTANG	Rp.	1.404.196.627
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.750.255.873

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.